

2025, BI PERKIRAKAN EKONOMI RI TUMBUH 4,9-5,7%

Perry Warjiyo Kembali Terpilih Jabat Gubernur BI Periode 2023-2028

JAKARTA, ID – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Perry Warjiyo untuk bertugas kembali sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Hal ini merupakan periode kedua Perry yang sebelumnya sudah mengemban amanah sebagai gubernur BI pada periode 2018 sampai 2023.

Oleh Arnoldus Kristianus

“Inilah yang diputuskan bersama secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan dari Komisi XI DPR RI mewakili sembilan fraksi, menyatakan beliau secara aklamasi menjadi calon gubernur,” ucap Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Gedung DPR pada Senin (20/3/2023).

Perry Warjiyo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon gubernur BI yang diadakan Komisi XI DPR RI pada Senin (20/3/2023). Eriko mengatakan bahwa Komisi XI DPR segera menyampaikan hasil keputusan terkait calon gubernur BI periode 2023-2028 tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Nanti disahkan di dalam rapat paripurna yang akan datang, dan akan dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028,” kata Eriko.

Menurut dia, sosok yang akan menjadi gubernur BI periode berikutnya harus mampu menjalin sinergi dengan seluruh pihak terkait. Indonesia sudah melewati masa-masa periode Covid-19 yang sangat berat dan itu bisa dilalui dengan kerja sama antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BI. KSSK juga terus menjalin sinergi dengan DPR untuk mendorong perekonomian nasional.

“DPR bersama dengan KSSK dalam waktu ke depan akan mengalami tantangan yang jauh lebih berat daripada hari ini. Sebab, sekarang saja sudah terjadi krisis di mana ada beberapa bank yang sudah kolaps, bahkan bank di Eropa juga sudah ada yang mengalami kolaps. Nah, untuk itu kami hari ini mengadakan *fit and proper test* dan calon Gubernur BI kita adalah Perry Warjiyo,” tutur Eriko.

Sementara itu, dalam uji kelayakan dan kepatutan paparan di hadapan Komisi XI DPR, Perry menjelaskan BI memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2025 mampu tumbuh dalam kisaran 4,9-5,7%, didukung antara lain oleh hilirisasi industri, ekspor, dan digitalisasi ekonomi. “Secara keseluruhan dalam jangka menengah panjang tahun 2025, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi bisa naik kembali 4,9-5,7%, bahkan bisa lebih tinggi hingga kemudian 2028 (tum-

buh) 5,1-5,9%,” kata dia.

BI juga memperkirakan inflasi tetap rendah, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat. Perry menuturkan defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap terkendali pada tingkat yang rendah, sehingga menopang stabilitas nilai tukar rupiah, kenaikan cadangan devisa, dan ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Di samping itu, BI memperkirakan prospek ekonomi Indonesia 2023-2024 terus melanjutkan pemulihan dan kebangkitan di mana ekonomi Indonesia 2023 diprediksi tumbuh pada kisaran 4,5-5,3% dan lebih tinggi pada 2024 di kisaran 4,7-5,5%.

Inflasi 2023 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1%, dengan inflasi inti terjaga di sekitar tiga persen. Sedangkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan kembali di bawah 4% mulai September 2023, dan ditargetkan berada di sekitar 2,5% plus minus 1% pada 2024.

Selanjutnya, pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Stabilitas eksternal akan tetap terjaga. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 didukung dengan perkembangan *e-commerce*, uang elektronik, dan *digital banking*.

Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek kebangkitan ekonomi Indonesia tersebut, Perry mengatakan Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

Tujuh Kebijakan BI

Pada kesempatan itu, Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan tujuh kebijakan dalam memperkuat dan ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional 2023-2028.

Kebijakan pertama yaitu penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). BI menjalankan lima langkah dalam menjalankan strategi tersebut. Pertama yaitu kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Kedua yaitu kebijakan sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal serta untuk pengembangan ekonomi-keuangan digital.

“Ketiga yaitu kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan kredit/

pembiayaan perbankan yang seimbang, termasuk surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucap Perry.

Keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan pasar uang, UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan kerja sama internasional. Kelima, penyediaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui pembelian/penjualan surat-surat berharga (SSB) dari pasar sekunder, penempatan dana pada LS dalam rangka pengembangan pasar uang, kebijakan GWM, maupun bauran kebijakan moneter dan instrumen lainnya, dengan tetap mengutamakan tujuan kestabilan nilai rupiah.

“Ini kami lakukan dan terus perkuat untuk mendukung ekonomi berkelanjutan,” imbuh Perry.

Kebijakan kedua, yaitu penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Kebijakan ketiga, yaitu akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan penerbitan digital rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan keempat, yaitu pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (*green and sustainable finance*). Kebijakan kelima, yaitu sinergi kebijakan BI dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong hilirisasi serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan keenam yaitu penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lain untuk kerja sama dan hubungan internasional. Terakhir yaitu transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat BI agar semakin profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.

Perry menuturkan pihaknya berkomitmen penuh untuk memperkuat konsistensi, inovasi, dan sinergi BI dalam memajukan perekonomian nasional ke depan. BI juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, KSSK, DPR dalam bauran kebijakan ekonomi nasional, koordinasi fiskal-moneter, akselerasi transformasi di sektor riil dan keuangan, serta inovasi dan akselerasi ekonomi dan keuangan digital. “Untuk semua itu mari kita terus memperkuat sinergi untuk ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi ke depan menuju Indonesia maju,” kata Perry. (th)



B Universe Photo/Mohammad Defrizal

Uji Kelayakan

Fit and Proper Test Gubernur BI. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan di Jakarta, Senin (20/3/2023). Perry Warjiyo menjadi calon tunggal yang namanya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur BI periode 2023-2028.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) Tahun Buku 2022 secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Auditorium Lantai 1 Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Link kehadiran elektronik : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://faks.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

MATA ACARA:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
- Penetapan Remunerasi (Gaji/ Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta Tantem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
- Persetujuan Penugasan Khusus Perseroan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana:
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Saham Perdana/ *Initial Public Offering* (IPO);
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue*; dan
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

- Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4**
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Penjelasan Mata Acara ke-5**
Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah, bahwa setiap penugasan khusus kepada BUMN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.
- Penjelasan Mata Acara ke-6**
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum yang telah direalisasikan.
- Penjelasan Mata Acara ke-7**
Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penetapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini diberlakukan melalui penguatan dalam RUPS Perseroan Terbuka yang bersangkutan.
- Penjelasan Mata Acara ke-8**
Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar khususnya pada Pasal 3 “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” yang mana terdapat pengurangan kegiatan usaha dengan kode KBLI 46634 dan 46610.
- Penjelasan Mata Acara ke-9**
Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 92-107 dan Pasal 108-121 UUPU *juncto* Pasal 3 dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pada Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari **Senin, 20 Maret 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
- Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS Tahunan dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSES KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web AKSES KSEI dalam tautan www.akses.ksei.co.id;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSES KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan www.easy.ksei.co.id;
 - Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPS Tahunan maupun mencabut kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan, yaitu hari **Selasa, 11 April 2023 pukul 12.00 WIB**.
- Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri RUPS Tahunan secara fisik, mohon untuk dapat mematuhi syarat dan ketentuan berikut:
 - Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Namun, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dalam situs web Perseroan di tautan www.ptpp.co.id/media-center/announcement dan apabila telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia melalui alamat email (adm.efek@bsrindonesia.com) di Nomor Telepon +62 21 80864722 selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 11 April 2023 pukul 15.00 WIB**.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan;
 - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir;
 - Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya.
- Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, antara lain:
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat pelaksanaan RUPS Tahunan;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti: *flu/batuk/ demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan* untuk memasuki Ruang rapat;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan www.ptpp.co.id/media-center/announcement dan menyerahkan kepada Panitia sebelum memasuki Ruang rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera dalam Formulir Deklarasi Kesehatan maka **tidak diperkenankan** untuk memasuki Ruang rapat;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada point “a” sd “c” di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurung haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam RUPS Tahunan.
- Bahan mata acara RUPS Tahunan telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan RUPS Tahunan;
- Bahan mata acara RUPS Tahunan dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan www.ptpp.co.id/media-center/announcement;
- Pemegang Saham atau Kuasanya dihimbau untuk hadir di tempat pelaksanaan RUPS Tahunan paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai.

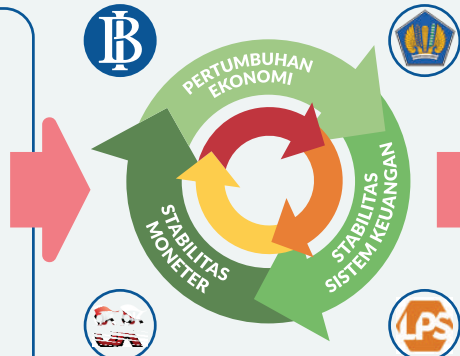
Jakarta, 21 Maret 2023
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.ptpp.co.id | @PTPP_ID | PTPPTBK | @PTPP_ID

Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional: Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi

LIMA RESPONS BAURAN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL:

- 1 KOORDINASI FISKAL DAN MONETER
- 2 AKSELERASI TRANSFORMASI SEKTOR KEUANGAN
- 3 AKSELERASI TRANSFORMASI SEKTOR RIIL
- 4 DIGITALISASI EKONOMI DAN KEUANGAN
- 5 EKONOMI DAN KEUANGAN HIJAU



TUJUAN PEREKONOMIAN:

- 1 KETAHANAN: TERJAGANYA STABILITAS DARI DAMPAK GEJOLAK GLOBAL
- 2 PEMULIHAN: MOMENTUM PERTUMBUHAN DARI PERMINTAAN DOMESTIK
- 3 KEBANGKITAN: PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI BERKELANJUTAN JANGKA MENENGAH

Sumber: Bank Indonesia

Impor Ilegal Pakaian Bekas Hambat Penyerapan 1 Juta Tenaga Kerja

JAKARTA, ID - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan, praktik impor ilegal pakaian bekas akan menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Bila hal ini terjadi, akan banyak UMKM gulung tikar dan banyak orang kehilangan pekerjaan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia. Praktik impor ilegal pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Penyebabnya, industri tekstil dan produk tekstil

(IPTP), pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yaitu sebesar 99,64% berdasarkan data Sensus BPS pada 2020.

“Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45% dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” jelas dia dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (20/3/2023).

Sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Tak hanya itu saja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan sebanyak 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok (78 penindakan), KPPBC Sintete (58 penindakan), KPPBC Tanjung Pinang (53 penindakan), KPPBC Teluk Nibung (33 penindakan), KPPBC Tanjung Balai Karimun (32 penindakan), KPPBC Ngarai (25 penindakan) dan KPPBC Atambua (23 penindakan). (ark)